

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah yang lebih baik serta leluasa dalam mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai kepentingan, prioritas dan potensi suatu daerah (Widada, 2012). Dengan terdapatnya otonomi daerah, memberi keleluasaan terhadap pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya serta bertanggungjawab pada masyarakat secara transparan, efektif dan efisien. Kemandirian daerah adalah salah satu unsur pokok dalam pelaksanaan otonomi daerah, hal tersebut didukung dengan kemampuan keuangan daerah. Dukungan keuangan merupakan faktor penting bagi pemerintah daerah, dukungan keuangan bisa diperoleh dari pendapatan asli daerah (Gitaningtyas & Kurrohman, 2014).

Salah satu substansi penting di dalam undang-undang mengenai otonomi daerah adalah terdapat peluang bagi daerah dalam menggali potensi keuangan pada suatu daerah. Daerah diberi kewenangan dalam mengelola serta mengatur sumber-sumber keuangan untuk membiayai pembangunan daerahnya. Pemerintah daerah kabupaten/kota secara bertahap harus mampu dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah, usaha pemerintah daerah

untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah merupakan salah satu usaha dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah (Priyono, 2016).

Pembangunan ekonomi daerah adalah proses dan kegiatan pemerintah daerah serta seluruh komponen masyarakat baik dari lembaga ataupun individu untuk mengelola sumber daya yang ada dan membentuk pola kemitraan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Kuncoro, 2004). Pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses, proses yang dimaksud ialah proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja guna menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan yang baru (Arsyad, 2010).

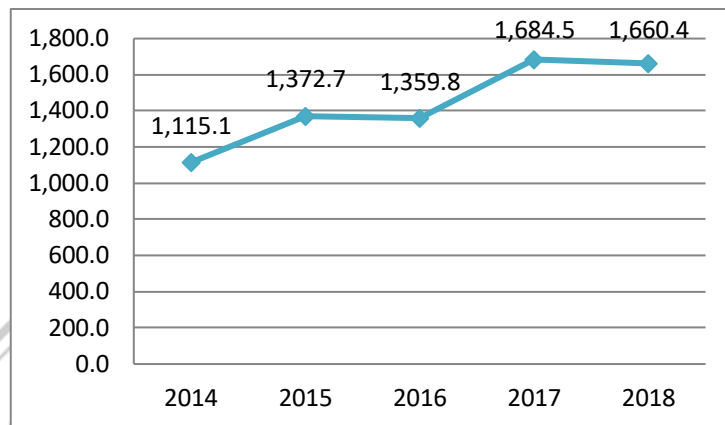
Pendapatan daerah mampu dicermati pada sisi mikro dan makro, pada sisi mikro didalam pemerintah daerah terdapat komabilitas antara komponen yang ada pada pemerintah daerah. Sedangkan pada sisi makro lebih menghendaki interaksi atau komabilitas antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Pada penjelasan tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa untuk meningkatkan pendapatan suatu daerah sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah pemerintah (pengatur kebijakan), pelaku ekonomi (pengusaha yang menyerap tenaga kerja) serta masyarakat baik sebagai konsumen maupun produsen (Mudrajad Kuncoro, 2010). Keberhasilan pemerintah sebagai penyelenggara negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,

sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk menyejahterakan masyarakat (Henry, 2013).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator kemandirian otonomi daerah guna menggali suatu potensi dalam meningkatkan sumber-sumber penerimaan. pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dengan meningkatnya penerimaan pendapatan asli daerah memberi kontribusi besar dalam realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal tersebut karena jumlah pendapatan asli daerah yang besar menambah jumlah APBD dari sisi pendapatan daerah. Maka sangat penting untuk suatu daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya serta menganalisis faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah.

Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki dua pulau terpisah terdiri dari 8 kabupaten dan 2 kota diantaranya adalah kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat, Bima, Dompu, kota Bima dan kota Mataram. Dengan sumber daya alam yang melimpah pada provinsi tersebut menjadikan masing-masing kabupaten memiliki potensi pendapatan dan anggaran daerah yang berbeda-beda pula, perkembangan pendapatan asli daerah provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

Grafik 1.1 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat Tahun 2014-2018



Sumber: BPS, Data diolah penulis, 2018

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa perkembangan pendapatan asli daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2014-2018 mengalami fluktuasi. Menurunnya pendapatan asli daerah pada tahun 2018 tidak lepas dari merosotnya penerimaan deviden (laba) dari investasi permanen pemerintah daerah pada badan usaha milik daerah (BUMD) maupun perusahaan lain, hal tersebut juga nampak dari menurunnya penerimaan dari retribusi daerah dan penerimaan pendapatan asli daerah lain yang sah (BPS, 2018).

Pendapatan suatu daerah diperoleh dari aktifitas penduduk pada perekonomian berupa penarikan pajak, retribusi dan lain sebagainya. Besarnya jumlah penduduk pada suatu daerah akan meningkatkan permintaan terhadap

barang-barang konsumsi, perkembangan jumlah penduduk berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah, dengan bertambahnya jumlah penduduk pada suatu daerah maka dapat berpotensi meningkatkan jumlah wajib pajak sehingga penerimaan pajak juga akan meningkat. Maka dengan bertambahnya jumlah penduduk berdampak langsung pada penerimaan pajak daerah (Saputra, Sudjana dan Djudi : 2014). Penelitian (Iman et al., 2019) menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. (Simatupang Laurencius, Putra Wirmie Eka, 2018) juga menyebutkan bahwa variabel jumlah penduduk berpengaruh signifikan positif terhadap pendapatan asli daerah. Akan tetapi pada penelitian (Harahap, 2018) menyatakan bahwa variabel jumlah penduduk tidak memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah, alasan tidak adanya pengaruh antara jumlah penduduk dengan pendapatan asli daerah disebabkan bahwa tidak semua masyarakat mempunyai penghasilan tinggi dan dituntut untuk mengeluarkan pajak. Faktor lain juga karena kurangnya kesadaran pada masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi dalam membayar pajak (Harahap, 2018).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gambaran perekonomian secara menyeluruh pada suatu daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memberi dampak langsung pada perolehan pendapatan daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan fungsi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan meningkatnya PDRB maka akan menambah penerimaan pemerintah daerah yang dapat digunakan untuk

membiayai program-program pemerintah atau pembangunan sarana dan prasarana, sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitasnya. PDRB merupakan nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah pada periode tertentu. PDRB merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu wilayah atau daerah (Sukmaraga:2011).

Dalam suatu negara keberhasilan pembangunan ekonomi ditandai dengan tingginya pendapatan perkapita masyarakat pada negara tersebut. Salah satu sektor dalam pembangunan ekonomi yaitu sektor industri, sektor industri memiliki peran dalam pembangunan suatu negara berkontribusi melalui penyerapan tenaga kerja dan mampu menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi pada berbagai komoditas yang dihasilkan. Ketika tingginya kontribusi dalam sektor industri tersebut tinggi maka dikatakan negara tersebut tergolong maju. Maka jika sektor industri maju berdampak pada PDRB akan meningkat dan berpengaruh terhadap meningkatnya pendapatan asli daerah.

Menurut Sriyana (2011), dalam istilah ekonomi, Industri mempunyai dua pengertian yaitu pengertian secara luas dan pengertian secara sempit. Dalam pengertian secara luas, industri mencakup semua usaha atau kegiatan dalam bidang ekonomi yang bersifat produktif. Sedangkan pengertian secara sempit, industri merupakan suatu kegiatan yang mengubah suatu barang secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi atau setengah

jadi. Industri adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah barang jadi dan barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih nilainya (Badan Pusat Statistik).

Disisi lain, pengeluaran pemerintah juga mencerminkan kebijakan pemerintah dan mempunyai pengaruh penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Jika pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan guna membeli barang dan jasa, maka pengeluaran pemerintah juga mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Pemerintah tentu tidak hanya melakukan pengeluaran, tetapi juga penerimaan. Penelitian yang dilakukan oleh (Hariyati, 2017; Damaningrum, 2015; Harahap, 2018; Husna, 2015) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Pengeluaran pemerintah dapat menghasilkan produk-produk yang diperlukan dalam meningkatkan kemajuan tingkat perekonomian, proses pertumbuhan kegiatan ekonomi padamasyarakat dapat meningkatkan pendapatan asli daerah bagi pemerintah daerah (Harahap, 2018).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dibuat rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

- 1) Apakah Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat?

- 2) Apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat?
- 3) Apakah Jumlah Industri berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat?
- 4) Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentu saja mempunyai tujuan yang hendak dicapai pada proses penyelenggaraannya. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Industri terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 4) Untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

- 1) Untuk memenuhi salah satu prasyarat dalam mencapai derajat Sarjana Ekonomi pada Program S1 Ekonomi Pembangunan

- 2) Memberi referensi kepada adik tingkat yang akan sampai pada tahap penyusunan skripsi ditahun yang akan datang.

Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah, diharapkan dapat mengurangi hambatan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang akan datang.

E. Batasan Masalah

Pada penelitian ini hanya difokuskan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Per Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Faktor-faktor yang dibahas adalah jumlah penduduk, PDRB, Jumlah Industri dan Belanja Modal. Untuk mengetahui pengaruh dari faktor-faktor tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah maka digunakan teknik pengukuran dengan metode regresi data panel dengan menggunakan program eviws 9.